



Menahan Diri untuk Tidak Beroperasi

■ Pemkot Masih Mengkaji Jalur Baru Skuter Listrik

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menegaskan operasional skuter listrik di kawasan Malloboro tetap dilarang. Hal itu sesuai Surat Edaran (SE) dari Gubernur DIY, yang sudah dikeluarkan beberapa waktu lalu.

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, mengatakan, sejauh ini, pihaknya sedang mencairkan tempat baru, untuk memfasilitasi para penyedia jasa otoped listrik di sepanjang sumbu filosofi tersebut. Karena itu, pihaknya mengimbau supaya semua menahan diri dan tidak beroperasi dulu.

"Kita minta teman-teman Satpol PP untuk bersinergi dengan Satpol PP DIY supaya menegakkan, aturan yang sudah ada," terangnya. Minggu (10/4).

Dia menambahkan, ketentuan itu harus ditaati bersama, sembari pihaknya membuat jalur-jalur untuk kawasan yang bisa digunakan. Menurutnya, Pemkot sedang memantapkan hal tersebut, lantaran memang banyak keluhan yang muncul dari warga masyarakat. Sehingga, penyedia jasa harus bisa memahami, bahwa ada tempat-tempat yang kini dilarang.

"Sedang digodak karena butuh skema pengawasannya juga. Itu penting, jangan sampai kita membuat aturan di sebuah tempat tapi kondisinya tidak siap," terangnya.

Nantinya, di tempat baru, operasional otoped listrik pun tak serta merta dibebaskan. Peraturan-peraturan terkait jumlah kendaraan yang disewakan dalam satu waktu dipastikan tetap ditegakkan. Sehingga, keberadaannya tidak lagi menimbulkan keluhan dari warga masyarakat.

"Ya, tentunya termasuk pembatasan jumlah dan bagaimana agar ditaati oleh mereka semua,"

ujarnya.

Kesempatan kedua

Para penyedia jasa skuter, atau otoped listrik di kawasan Malloboro, Kota Yogyakarta berkeluh-kesah selepas operasionalnya dilarang. Mereka berharap masih ada kesempatan kedua untuk beroperasi.

Ketua Paguyuban Persewaan Skuter Listrik Malloboro, Adi Kusuma Putra Suryawan, menegaskan, pihaknya siap dibina dan mengikuti segala aturan yang berlaku, seandainya diberi kesempatan lagi. Ia pun menghaturkan permohonan maaf, jika operasionalnya seringkali dianggap mengganggu.

"Ketika membuat crowd, kemudian ada yang terganggu, kami mohon maaf. Tapi, kami sepenuhnya siap dibina, serta turut membantu mengembangkan pariwisata Yogyakarta, khususnya Malloboro," ungkapnya.

Menurutnya, upaya Pemkot Yogyakarta yang kini tengah menyiapkan tempat baru untuk operasional skuter listrik di luar kawasan Malloboro, tidak terlalu solutif. Dia menilai, pedestrian di pusat perekonomian kota pelajar tersebut merupakan lokasi paling tepat bagi mereka.

"Ya, tetap Malloboro. Alhamdulillah, selama ini bisa jadi pendongkrak antusiasme wisatawan. Banyak loh itu, yang datang jauh-jauh hanya untuk naik skuter," ujar Adi.

Ia bersama rekan-rekan sesama penyedia jasa persewaan otoped listrik pun tidak memperlakukan, ketika Pemkot, atau Pemda DIY, hanya mengizinkan operasionalnya selama pedestrian penuh pukul 18.00-22.00. Menurutnya, itu jauh lebih baik, daripada sama sekali dilarang buka. "Dari pukul 18.00-22.00 kan ditutup (dari kendaraan bermotor, mengapa tidak diman-

ATURAN TEGAS

- Pemkot Yogyakarta menegaskan skuter listrik dilarang di kawasan Malloboro.
- Penyedia jasa diminta untuk menahan diri beroperasi.
- Pemkot tengah memantapkan kajian jalur baru skuter listrik.
- Penyedia jasa otoped listrik berharap masih ada kesempatan kedua.

faatkan? Karena lokasi yang paling layak itu, ya di Malloboro. Kami berharap masih bisa bertahan, walaupun di jam-jam tertentu," terangnya.

Adi pun mengaku sudah berupaya menjalin komunikasi, dengan jajaran Pemkot Yogyakarta, atau Pemda DIY, untuk duduk bersama membahas masalah ini. Namun, sayangnya, harapan untuk beradiksi belum membuahkan hasil.

"Beberapa kali menemui kegagalan, tapi kami masih berusaha. Kami berharap sekali bisa diundang, supaya uneg-uneg teman-teman tersampaikan, dan apa saja yang harus dibenahi agar diizinkan lagi kami mengerti," jelasnya.

Dia menyebut sebagian besar pelaku otoped listrik di kawasan Malloboro ini merupakan usaha warga sekitar yang banting stir akibat terdampak pandemi Covid-19. Bahkan, ia melanjutkan, tidak sedikit yang membaratkan diri ambil kredit, lantaran melihat potensi besar persewaan kendaraan elektrik tersebut.

"Padahal, di (paguyuban) kami ada aturan, penyewa harus berusia di atas 17 tahun, jadi tidak sembarangan orang bisa menyewa. Kami berharap memperoleh solusi, supaya bisa mengais rezeki kembali di Malloboro," ucapnya. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			
3. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya			

Yogyakarta, 20 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005